



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FINTJE LUMEMBANG**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **406703**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.658.552.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/45 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m²/45 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/159 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 1096 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 588.552.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.157.600.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INOVA ZENIX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 477.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 268.137.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.041.342.985
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.125.631.985
III. HUTANG	Rp.	254.340.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.871.291.985

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.